

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Demokrasi dan politik tidak bisa dipisahkan dikarenakan kedua hal tersebut saling mengikat, bergantung dan mempengaruhi satu sama lain yang mengandalkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan Keputusan. Dengan demikian secara keseluruhan, politik merupakan jantung dari demokrasi. tanpa adanya politik, demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik dan juga berlaku sebaliknya, tanpa adanya demokrasi politik akan menjadi sistem pemerintahan yang otoriter ( Sudiarjo, 2008, hlm. 106 ). Jadi, banyak perspektif akademis yang menunjukkan bahwa demokrasi dan politik adalah dua sisi yang sama, saling mendukung dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berpartisipasi ( Emanuel, 2007 hlm. 7 ).

Demokrasi memiliki arti demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan, jadi demokrasi bisa didefinisikan bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat. Abraham Lincoln mengatakan dalam teorinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ini menekan bawasannya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang memilih perwakilan dari mereka. Dari definisi tersebut seharusnya rakyatlah yang mempunyai peran penting dalam mengambil keputusan-keputusan yang berlaku sebab rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi di negara yang berdemokrasi. Sebab itu rakyat bisa memilih atau dipilih sebagai salah satu dari perwakilan rakyat itu sendiri dengan cara pemilihan umum. Hal ini seiring pula dengan teori dari Samuel P. Huntington adalah Keputusan bersama rakyat dan disetujui oleh orang-orang yang dipilih dalam pemilihan umum ( Surbakti, 1992, hlm. 30 ). Dalam konteks ini, penting untuk

memahami bahwa pemilihan umum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai sarana untuk mengekspresikan kehendak rakyat dan menciptakan pengesahan bagi pemerintah yang terpilih. Proses ini memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dengan memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan rakyat.

Politik merupakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan pengambilan Keputusan. Di Indonesia kegiatan politik memiliki wadah yang dinamai dengan partai politik, hal ini tentunya sesuai dengan UU no. 2 tahun 2011 tentang perubahan dari UU no. 2 tahun 2008 tentang partai politik. UU Nomor 2 Tahun 2011 ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia dengan memastikan bahwa partai politik berfungsi dengan baik dan bertanggung jawab dalam mewakili kepentingan masyarakat. Didalam Undang Undang tersebut juga diatur berbagai aspek terkait pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan partai politik. Adapun fungsi dan Peran Partai politik memiliki fungsi utama dalam sistem demokrasi, seperti menyalurkan aspirasi masyarakat, ikut serta dalam proses politik, dan menjadi sarana pendidikan politik. Melalui partai politik inilah masyarakat dapat menentukan wakil-wakilnya yang akan dipilih oleh Masyarakat dalam pemilihan umum ( PEMILU ) sesuai dengan Undang Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Hasil pemilu akan menentukan siapa yang terpilih sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat yang terpilih akan menjalankan tugasnya untuk mewakili aspirasi masyarakat di lembaga legislatif, baik di tingkat daerah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) maupun pusat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ).

Wakil rakyat yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat memiliki sejumlah tugas sesuai dengan fungsinya, yaitu wakil rakyat berfungsi sebagai Legislasi, Anggaran dan Pengawasan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.17 tahun 2014 ( Suryosumunar, 2022, hlm. 123-130 ). Sebagaimana disebutkan bahwa salah satu tugas dari wakil rakyat adalah legislasi artinya adalah wakil rakyat bertugas dalam membuat Keputusan dalam bentuk produk Undang-Undang bagi wakil rakyat duduk di DPR RI dan produk Peraturan Daerah bagi wakil rakyat yang duduk di DPRD Propinsi atau Kab/Kota, yang mana seharusnya wakil rakyat dalam membuat Keputusan ini harus melibatkan aspirasi Masyarakat sebagai bentuk bahwa negara kita adalah negara demokrasi, tetapi pada kenyataannya sering terjadi wakil rakyat membuat keputusan dengan mengabaikan aspirasi dari Masyarakat sehingga dihasilkan Keputusan yang tidak pro rakyat, sehingga rakyat merasa dirugikan dengan Keputusan tersebut. Kondisi inilah yang menyebabkan krisis kepercayaan rakyat terhadap wakilnya yang telah diberikan kepercayaan. Kondisi ini tentunya tidak bisa di biarkan, karena kalau dibiarkan maka perlahan demokrasi di Indonesia akan musnah dan akan tercipta kekuasaan yang otoriter ( Harto, 2015, hlm. 1 ). Untuk mencegah hal itu terjadi maka semua elemen Masyarakat harus bangkit untuk terus berperan aktif melakukan kritikan-kritikan baik itu dalam bentuk pergerakan maupun dalam bentuk karya-karya dalam menyampaikan kritikan dan aspirasi terhadap wakil-wakil rakyat yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) sampai ke Tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ) maupun terhadap pemerintah guna meluruskan demokrasi di Indonesia, agar tercipta Keputusan-keputusan yang pro rakyat yang tidak akan merugikan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui karya-karyanya, seniman termasuk elemen masyarakat yang mampu berperan dalam mengkritisi keputusan maupun kebijakan yang dibuat oleh wakil rakyat dan pemerintah. Seperti misalnya seorang fotografer bisa mengkritisi melalui karya-karya fotonya, seorang pelukis bisa mengkritisi melalui karya-karya lukisnya, seorang pembuat film/video bisa mengkritisi melalui karya-karya video atau film, dan banyak lagi seniman-seniman lainnya yang bisa mengkritisi melalui karya-karya sesuai dengan keilmuannya ( Ashari & Mahadian, 2020 ).

Seniman pembuat video/film dalam mengkritisi keputusan-keputusan yang dibuat oleh para wakil rakyat salah satunya bisa melalui karya *Short Movie* dalam bentuk kritikal, Dimana *Short Movie* merupakan film dengan durasi pendek di bawah 40 menit , simple serta memiliki nuansa kompleks dan tidak dianggap sebagai film utama atau film Panjang ( Tjasmadi, 2008, hlm. 44 ). *Short Movie* dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan yang mendalam, menggiring mindset penonton, dan juga dapat menggerakkan penonton untuk melakukan sesuatu.

Dari kegunaan *Short Movie* yang disampaikan diatas, maka seniman pembuat film dalam ikut berpartisipasi aktif meluruskan demokrasi sangatlah cocok dengan membuat karya *Short Movie* dalam bentuk kritikal, hal ini dikarenakan film ini dapat menyampaikan pesan yang mendalam terhadap wakil rakyat maupun pemerintah agar dalam membuat Keputusan haruslah pro terhadap rakyat, disamping durasi yang pendek sehingga isi dari film lebih mudah dicerna oleh penonton ( Hayward, 1996, hlm. 72; Siagian, 2006, hlm. 6-8 ).

Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk membuat sebuah karya *Short Movie* dalam bentuk Kritikal pada Tugas Akhir ini guna ikut berperan aktif dalam

meluruskan demokrasi dalam sistem politik di Indonesia, dengan judul laporan “MELURUSKAN DEMOKRASI DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA MELALUI SHORT MOVIE DALAM BENTUK KRITIKAL“.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka bisa dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Short Movie dalam bentuk Kritikal dapat memvisualkan dalam mengkritisi guna meluruskan demokrasi dalam sistem politik di Indonesia ?
2. Bagaimana Short Movie dalam bentuk Kritikal dapat memvisualkan keputusan-keputusan yang dibuat oleh wakil rakyat baik keputusan yang pro rakyat maupun yang tidak pro rakyat

## **1.3 Batasan Masalah**

Sebagaimana rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar karya yang dibuat dalam Tugas Akhir ini lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Dimana karya dari Tugas Akhir ini akan menitikberatkan pada pembuatan Short Movie dalam bentuk Kritikal sebagai bentuk partisipasi dan kritik untuk meluruskan demokrasi dalam sistem politik di Indonesia. Adapun masalah-masalah yang akan di visualkan dalam karya ini hanya sebatas hal-hal sebagai berikut :

1. Visual dari Pergerakan rakyat sebagai bentuk partisipasi dan kritik masyarakat dalam meluruskan demokrasi pada sistem politik di Indonesia

2. Visual dari keputusan-keputusan yang telah di buat oleh wakil rakyat baik yang pro rakyat maupun yang tidak pro rakyat yang mengakibatkan rakyat tidak percaya kepada wakil-wakilnya yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat

#### **1.4 Tujuan Berkarya**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka karya yang dibuat memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Tercapainya karya yang dapat memvisualkan dari Pergerakan rakyat sebagai bentuk partisipasi dan kritk masyarakat dalam meluruskan demokrasi pada sistem politik di Indonesia
2. Tercapainya karya yang dapat memvisualkan dari keputusan-keputusan yang telah di buat oleh wakil rakyat baik yang pro rakyat maupun yang tidak pro rakyat yang mengakibatkan rakyat tidak percaya kepada wakil-wakilnya yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat

## 1.5 Kerangka Berpikir

